



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Mampukah ERP Mengatasi Kemacetan



Ibu Nataru telah usai, pekerja, pelajar, dan masyarakat umum pun kembali beraktivitas seperti semula. Kondisi lalu lintas di kota-kota besar seperti di kawasan Jabodetabek kembali macet. Antrean panjang kendaraan yang nyaris tak bergerak jadi pemandangan di jam-jam sibuk. Kemacetan di kota besar macam Jakarta sepertinya sudah menjadi persoalan pelik yang sulit dipecahkan.

Macet menimbulkan kerugian yang cukup besar. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jakarta sebesar Rp65 triliun per tahun.

Sejatinya sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta seperti mengoperasikan armada TransJakarta, membatasi jumlah penumpang di kendaraan pribadi atau yang lebih dikenal dengan istilah *3 in 1*. Juga ada pembatasan kendaraan yang melintas melalui aturan pelat nomor ganjil genap, pembatasan penggunaan jalan bagi kendaraan roda dua. Kemudian pengoperasian moda transportasi publik berbasis rel seperti MRT dan LRT.

Namun tampaknya semua upaya tadi belum mampu mengatasi kemacetan di Jakarta. Bahkan ada kecenderungan intensitas kemacetan makin bertambah parah.

Terbaru Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias *electronic road pricing* (ERP). Adapun penerapan sistem ERP tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PPLE). Raperda ini ditargetkan disahkan pada 2023 ini. Dalam Pasal 13 ayat 1 Raperda PPLE disebutkan pengguna jalan yang melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik dikenai tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Mulai awal tahun ini, Pemprov DKI telah menyosialisasikan 25 jalan di Jakarta yang akan diberlakukan sistem ERP. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati jalan tersebut harus membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Jalan-jalan utama yang bakal menerapkan sistem ERP itu tersebar di lima kawasan DKI Jakarta. Termasuk Jalan Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, dan HR Rasuna Said.

Pro-kontra pun bermunculan menyikapi rencana Pemprov Jakarta yang akan menerapkan sistem ERP ini. Kebijakan ini salah satunya bertujuan membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik. Nah, selama tarif transportasi umum lebih mahal daripada biaya menggunakan kendaraan pribadi, khususnya motor, kebijakan ini dinilai tidak akan efektif.

Ada juga yang mengatakan jalan-jalan tersebut dibangun dengan biaya APBN dan APBD. Artinya uang rakyat yang digunakan untuk membuat jalan tersebut, tapi mengapa kini rakyat harus membayar ketika menggunakannya?

Meski demikian penerapan ERP di beberapa negara seperti di Singapura, Inggris, Jerman, Swedia, dan Belgia terbukti mampu mengurangi kemacetan. Karena itu ada yang optimistis penerapan ERP akan mampu mengurangi kemacetan di Jakarta. Dan nantinya dapat diaplikasikan di kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Terlepas dari pro-kontra atas rencana ini, memang perlu ada upaya nyata yang sangat serius untuk mengurangi persoalan kemacetan di Jakarta. Pasalnya pertumbuhan kapasitas jalan lebih kecil daripada pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

Berkaca dari upaya-upaya sebelumnya yang belum mampu mengatasi persoalan ini, satu upaya saja dipastikan tak akan berhasil. Perlu integrasi secara simultan dari berbagai upaya dan kebijakan yang dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Selain menerapkan ERP, penerapan pelat nomor ganjil genap masih perlu terus dilanjutkan. Kantong-kantong parkir di pinggiran Jakarta juga perlu ditambah kapasitasnya. Transportasi publik yang sudah ada, seperti TransJakarta, MRT, LRT dan *Commuter Line* makin dimaksimalkan dan tarifnya dibuat makin ramah di kantong. ▣